

**INTERAKSI PEMBELAJARAN
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEKOLAH STANDAR
NASIONAL
STUDI SITUS DI SMA 1 CEPU KABUPATEN BLORA**

TESIS

Diajukan Kepada

**Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Universita Muhammadiyah
Surakarta untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Magister Pendidikan**



Oleh :

AHMAD IRFAN

NIM: Q 100080001

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2010**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan dilaksanakan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggungjawab (Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, pasal 3).

Dalam sistem pendidikan, kurikulum merupakan komponen yang sangat penting, sebab kurikulum dipersiapkan dan dikembangkan untuk mencapai tujuan pendidikan (Sanjaya, 2009: 10). Sejalan dengan itu, di Indonesia, secara bertahap diadakan penyempurnaan kurikulum. Penyempurnaan kurikulum dimaksud, bahkan termasuk juga mencoba hal-hal baru, yaitu hal-hal yang secara konseptual, prosedural, kualitatif berbeda dengan yang biasa digunakan (Sukmadinata, 2006: 20).

Sejak tahun 2006, dengan dijiwai semangat otonomi daerah di bidang pendidikan atau desentralisasi pendidikan, pemerintah menggulirkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP). Orientasinya adalah meningkatkan efektivitas pencapaian tujuan pendidikan nasional seperti

tertuang dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kurikulum tingkat satuan pendidikan memberi kesempatan yang luas kepada masing-masing sekolah untuk mengembangkan diri sesuai dengan kebutuhan daerah, sesuai dengan karakteristik sekolah, serta sesuai dengan kondisi dan kemampuan peserta didik.

Pengembangan KTSP pada hakekatnya merupakan realisasi dari pelaksanaan manajemen berbasis sekolah (*school based management*). Penerapan manajemen berbasis sekolah bertolak dari asumsi bahwa sekolah memiliki kemampuan untuk merancang, menggali, memanfaatkan, meningkatkan sumber-sumber daya internal dan eksternal untuk mencapai tujuan-tujuan sekolah (Sukmadinata, 2006: 23). Dengan menggali dan memanfaatkan sumber dayanya sendiri maka kurikulum yang diterapkan oleh sekolah benar-benar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan sekolah.

Konsekwensinya, kurikulum yang dikembangkan antar sekolah bisa berbeda-beda. Namun demikian, perbedaan tersebut tetap berpedoman dan berada pada ruang lingkup Standar Nasional Pendidikan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005. Kemasam kurikulum yang berbeda-beda ini pada akhirnya akan bermuara pada visi, misi, dan tujuan yang sama yang diikat oleh Standar Nasional Pendidikan (Mulyasa, 2009: 2).

Ada delapan standar yang harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang

Standar Nasional Pendidikan. Dengan adanya standar nasional tersebut, meskipun sekolah memiliki keleluasaan, namun tidak boleh bertindak semaunya sendiri. Delapan standar itu meliputi standar isi, standar kompetensi lulusan, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan, standar penilaian, dan standar keuangan. Sekolah yang telah mampu memenuhi delapan standar tersebut disebut sekolah standar nasional (SSN) atau disebut juga sebagai sekolah kategori mandiri (SKM).

Implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan bagi sekolah yang sudah berkategori SSN diharapkan setidaknya mendekati atau bahkan telah sesuai dengan Standar Proses. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 41 tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah mengatur bahwa standar proses meliputi empat macam, yaitu perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran. Sehubungan hal tersebut sekolah harus berusaha agar seluruh kegiatan sekolah, khususnya proses pembelajaran guru mengacu pada ketentuan standar tersebut.

Apabila guru-guru di sekolah telah menerapkan standar proses dengan baik dalam proses pembelajarannya, maka pencapaian tujuan pendidikan dapat berjalan efektif dan efisien. Gurulah ujung tombak pelaksana kurikulum yang ditetapkan secara nasional dan yang diberlakukan sekolah sebagai kurikulum tingkat satuan pendidikan. Secara jujur harus diakui bahwa sukses tidaknya implementasi kurikulum sangat dipengaruhi oleh kemampuan guru yang akan

menerapkan dan mengaktualisasikan kurikulum tersebut dalam pembelajaran (Mulyasa, 2009: 5). Dengan kata lain, betapapun kurikulum diperbaharui apabila guru sebagai ujung tombak pelaksana kurikulum dalam pembelajarannya di kelas statis, tidak ada pembaharuan diri maka sulit mencapai keberhasilan kurikulum.

Beberapa hal mempengaruhi lemahnya implementasi kurikulum dalam pembelajaran, diantaranya kemampuan paedagogi dan komitmen profesi yang rendah. Disamping itu masih adanya kesenjangan guru dilihat dari keahliannya sehingga bidang tugasnya tidak sesuai latar belakang pendidikannya. Berdasarkan data Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional (Balitbang Depdiknas) tahun 2004 sebanyak 32,9 % atau 75.684 orang guru SMA masuk kategori tidak layak mengajar karena tugas mengajarnya tidak sesuai dengan bidang keahliannya atau ijazahnya *mismatch* (Anonim, 2008: 30). Data selengkapnya sebagai berikut.

Tabel 1. Data Kelayakan Mengajar Guru dan Kepala SLTA

Kelayakan	Negeri	%	Swasta	%	Jumlah	%
SMA	122.803	53.4	107.311	46.6	230.114	100.0
a.Layak	87.379	38.0	67.051	29.1	154.430	67.1
b.Tidaklayak	35.424	15.4	40.260	17.5	75.684	32.9
SMK	48.645	33.0	98.914	67.0	147.559	100.0
a.Layak	27.967	19.0	55.631	37.7	83.598	56.7
b.Tdk Layak	20.678	14.0	43.283	29.3	63.961	43.3

Sumber: Balitbang Depdiknas

Dalam setiap proses pembelajaran di kelas harus berlangsung interaksi belajar mengajar yang bersifat edukatif antara siswa sebagai pihak yang melakukan

kegiatan belajar dengan guru yang melaksanakan tugas mengajar. Guru sebagai pengajar harus mampu memberikan motivasi serta *reinforcement* kepada pihak warga belajar/siswa/subyek didik, agar dapat melakukan kegiatan belajar secara optimal (Sardiman, 2009: 2). Proses pembelajaran yang tidak mendorong siswa untuk mengubah perilakunya sehingga sesuai dengan tujuan pelajaran, proses interaksinya dipertanyakan oleh Winarno Surakhmad. Apakah gerangan yang benar-benar terjadi di dalam kelas, adakah berlangsung interaksi yang edukatif? (Surakhmad, 2003: 10).

Guru Pendidikan Kewarganegaraan mempunyai tanggungjawab yang sama dengan guru mata pelajaran yang lain dalam mengimplementasikan kurikulum di sekolahnya masing-masing demi tercapainya tujuan pendidikan. Bahkan guru Pendidikan Kewarganegaraan memiliki kedudukan khusus, mengingat Pendidikan Kewarganegaraan memiliki karakteristik sebagai mata pelajaran moral dan kepribadian. Oleh karena itu, guru Pendidikan Kewarganegaraan dituntut mampu mendesaian dan mengembangkan interaksi pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan (*joyfull teaching and learning*), sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.

SMA 1 Cepu sebagai salah satu SMA di kabupaten Blora, sejak tahun pelajaran 2007/2008 telah ditetapkan memenuhi kategori sekolah standar nasional (SSN), meskipun belum semua standar pendidikan bisa dipenuhi 100%. Oleh karena itu wajar bila SMA 1 Cepu menjadi sekolah pilihan bagi masyarakat

Blora bagian timur. Hal ini terlihat dari jumlah pendaftar siswa baru yang selalu melebihi pagu yang telah ditetapkan. Disamping itu lulusannya banyak diterima di berbagai perguruan tinggi negeri, dan sebagian ada yang langsung bekerja di perusahaan nasional maupun internasional.

Tabel 2. Data Perkembangan Pendaftar SMA 1 Cepu Tahun 2007-2009

Tahun Pelajaran	Pendaftar	Diterima	Kapasitas Ruang
2007/2008	315	280	40
2008/2009	460	260	38
2009/2010	318	252	36

Sumber: BK SMA 1 Cepu

Berdasarkan data di atas tampak bahwa pendaftar ke SMA 1 Cepu meskipun mengalami naik turun, selalu melebihi kapasitas daya tampung sekolah. Hal ini menunjukkan kepercayaan masyarakat yang cukup tinggi kepada SMA 1 Cepu. Kepercayaan tersebut membawa konsekwensi yang tidak ringan kepada segenap komponen SMA 1 Cepu. Untuk itu sekolah harus mampu menjaga kepercayaan tersebut dengan baik dalam bentuk kinerja dan pembelajaran yang professional.

Sebagai wujud tanggungjawabnya kepada masyarakat, sekaligus dalam rangka memenuhi delapan standar nasional pendidikan, maka SMA 1 Cepu selalu berbenah diri melengkapi indikator standar yang belum maksimal. Termasuk di dalamnya pemenuhan standar proses. SMA 1 Cepu juga berusaha agar pembelajaran yang dilakukan guru-gurunya mengacu standar proses yang

telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 41 tahun 2007.

Demikian pula guru-guru Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pengampu mata pelajaran yang termasuk kelompok mata pelajaran kepribadian dan memiliki misi sebagai pembentuk karakter bangsa, dalam setiap pembelajarannya dituntut mengembangkan interaksi yang edukatif. Namun demikian, disinyalir masih ada guru, karena alasan tertentu, pelaksanaan pembelajarannya cenderung konvensional.

Sehubungan hal tersebut, penulis berusaha mengkaji lebih dalam tentang pengelolaan interaksi pembelajaran pendidikan Kewarganegaraan di SMA 1 Cepu melalui penelitian yang berjudul “INTERAKSI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEKOLAH STANDAR NASIONAL, STUDI SITUS DI SMA 1 CEPU KABUPATEN BLORA”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian di atas fokus penelitian ini, “Bagaimana karakteristik pengelolaan interaksi pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Standar Nasional di SMA 1 Cepu Kabupaten Blora?”. Fokus tersebut dijabarkan menjadi dua sub fokus.

1. Bagaimana karakteristik interaksi guru dengan siswa dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Standar Nasional di SMA 1 Cepu Kabupaten Blora?

2. Bagaimana karakteristik interaksi siswa dengan siswa dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Standar Nasional di SMA 1 Cepu Kabupaten Blora?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan fokus yang diuraikan di atas maka tujuan penelitian ini ada dua macam.

1. Mendeskripsikan karakteristik interaksi guru dengan siswa dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Standar Nasional di SMA 1 Cepu Kabupaten Blora.
2. Mendeskripsikan karakteristik interaksi siswa dengan siswa dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Standar Nasional di SMA 1 Cepu Kabupaten Blora.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Blora

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Blora dalam memantau keterlaksanaan standar proses pembelajaran pada sekolah standar nasional. Lebih lanjut Dinas Pendidikan mempunyai dasar obyektif untuk melakukan evaluasi kinerja sekolah sekaligus memberikan pembinaannya.

2. Bagi sekolah

Memberi masukan pada SMA 1 Cepu sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan pengembangan kualitas guru. Guru yang berkualitas diperlukan agar pelaksanaan pembelajarannya sesuai standar nasional. Peningkatan kualitas pendidikan menuntut guru yang berkualitas atau guru yang profesional. Sehubungan hal tersebut setiap saat sekolah harus selalu mengembangkan kualitas guru.

3. Bagi masyarakat

Sebagai sumber informasi tentang kualitas pembelajaran SMA 1 Cepu yang telah berstatus sebagai sekolah standar nasional (SSN). Informasi tersebut diperlukan masyarakat untuk menjadi bahan pertimbangan dalam memilih sekolah bagi putra-putrinya.

E. Definisi Istilah

1. Interaksi artinya saling berhubungan, saling beraksi (Tim prima Pena: 349).

Pembelajaran diartikan proses interaksi peserta didik dengan guru pada suatu lingkungan belajar (Anonim, 2007: 424).

2. Dengan demikian maksud interaksi pembelajaran adalah saling berhubungan atau saling beraksinya antara peserta didik dengan guru pada suatu lingkungan belajar.

3. Pendidikan Kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang bertujuan untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara, serta membentuk sikap

dan perilaku cinta tanah air yang bersendikan kebudayaan dan filsafat bangsa Pancasila (Kaelan, 2007: 3).

4. Sekolah Standar Nasional (SSN) adalah sekolah yang kemampuannya memenuhi standar nasional pendidikan mencapai lebih dari 75% atau bahkan yang ideal mencapai 100% (Anonim, 2008: 1114).